

**KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI JEPANG
PASCA PENDUDUKAN SEKUTU**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan
Gelar Sarjana Sastra Jepang

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

SHOBAH NAWALIYAH

06110034

PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA JEPANG

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

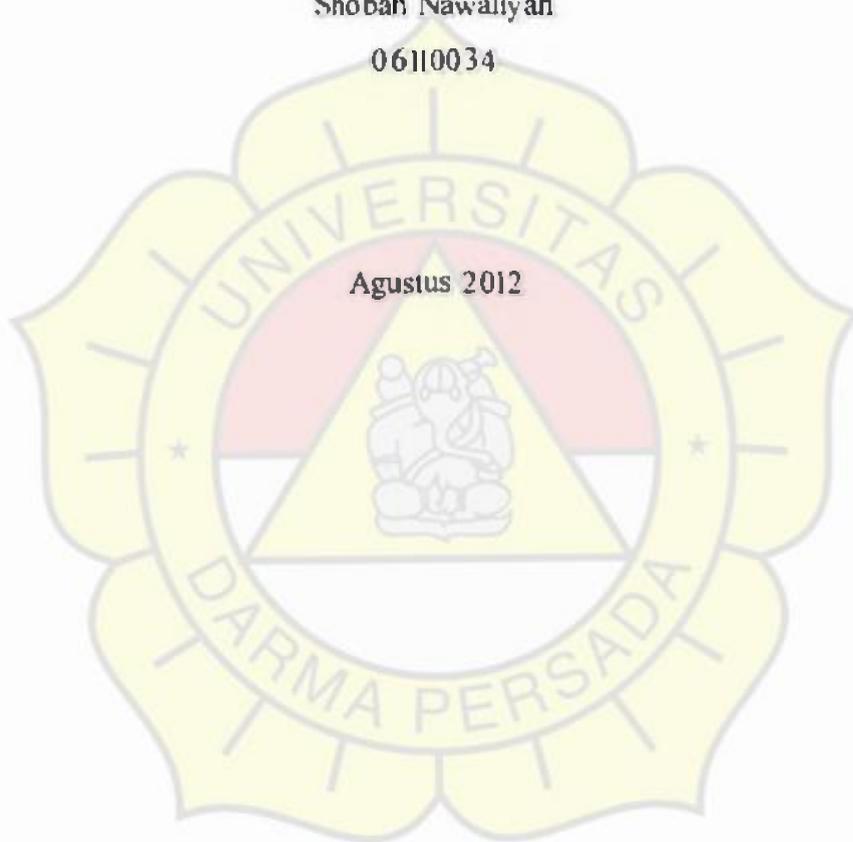
2012

KEASLIAN SKRIPSI

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang dikutip telah saya nyatakan dengan benar.

Shobah Nawaliyah

06110034



HALAMAN PENGESAHAN

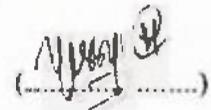
Skripsi ini telah diujikan pada hari Rabu

Okh

DEWAN PENGUJI

Yang terdiri dari:

Pembimbing : Nani Dewi Sunengsih S.S,MPd 

Pembaca : Yessy Harun S.S,M.Pd 

Ketua Penguji : Dra. Yuliasih 

Disahkan pada hari Rabu tanggal 1 Agustus tahun 2012

Ketua Program Studi,

Dekan,



Hari Setiawan MA



Syamsul Bahri SS, M.Si

ABSTRAK

名前 : ショバナワリヤ

このほんろんぶんで は日本にどうめいこくと日本のがどうせいあくポストせんりをうしらべます。

すべての日本は1945年にだいにじせかいたいせいせんをいしなつたくにであるしっているようにあたがって、アメリカでは、どうめいこくにしたがってください。

日本のこくないとがいうせいさくはにほんが1952年にどくりつをせんげんしたあとでもアメリカのりやくにもとずりていだ がじよじよ日本人は日本のせいさくのアメリカのえいきょうからはなれてたちあがるたちあがるとしよとしていた。

分析の外交政策の考え方や法の枠組みに基づいて、本論文は、日本の外交政策の実施は、その国内政治のニーズに基づいていると結論づけているにも、米国の利益に合わせて調整されています。

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya.

Penyusunan Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Sastra Program Studi Sastra Jepang pada Fakultas Sastra, Universitas Darma Persada.

Tugas akhir ini berjudul “**Kebijakan Politik Luar Negeri Jepang Pasca Pendudukan Sekutu** “. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Nani Dewi Sunengsih, M.Pd selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Yessy Harun, M.Pd selaku dosen pembaca yang mau meluangkan waktunya untuk membaca skripsi ini.
3. Dra. Yuliasih Ibrahim sebagai ketua penguji.
4. Dekan Fakultas Sastra, Syamsul Bahri, M.Si
5. Hari Setiawan, MA sebagai Ketua Jurusan Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang Universitas Darma Persada.
6. Ibu Dilla dan Ibu Ira sebagai Pembimbing Akademis yang telah memberikan semangat serta dorongannya kepada penulis selama menjadi mahasiswi Universitas Darma Persada.

7. Bapak dan Ibu dosen program Studi Bahasa dan Sastra Jepang Universitas Darma Persada yang telah mendidik serta memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh staff sekretariat uda Armel, Pak Heri, Pas Wastono dan staff perpustakaan Universitas Darma Persada, staff perpustakaan The Japan Foundation serta Universitas Indonesia yang banyak membantu penulis dalam mengumpulkan bahan skripsi.
9. Untuk kedua orang tua tercinta, Sholeh Ramly dan Saidah Zaini, yang selalu memberikan doa, dukungan moril dan juga materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ini untuk kalian maa-paa..
10. Kepada kakak dan adik, Rizka, Lulu, Shofy dan Bekha yang telah memberikan dukungan dan semangatnya disaat saya sudah mulai lelah.
11. Kepada kakak-kakak iparku, Ka Didi dan Ka Iyan. Terimakasih atas dukungannya.
12. Untuk Muhammad Reza Novali yang memberikan semangat, tenaga dan waktunya pada masa awal pembuatan skripsi ini. Thanks.
13. Teman-temanku tercinta Gilang Rahfika, Ivon Sianturi, Salman Alfariisi, Riris Anitya Ramadhani, Atika, Muli dan Eka, karena kalian telah memberikan semangat, dukungan dan juga hari-hari yang berwarna serta untuk teman-teman seangkatan 2006 terutama anak kelas B.
14. Untuk teman-teman seperjuangan dalam skripsi dan bimbingan Bu Nani, Lydya Novianti dan Tete, Terima kasih atas perjuangannya bersama-sama.
15. Teman-teman SMA : Itoh, Yani, Mike, Oo, Leonita dan Miea dan lainnya, terima kasih atas supportnya.
16. Uwie Tiana yang membantu dalam menterjemahkan bahan skripsi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Rendy dan Haris yang membantu penyelesaian skripsi ini di detik-detik terakhir, Amir Rizky yang membantu dalam pembuatan footnote dan Ka Iwan di Jepang yang membantu menerjemahkan bahan skripsi dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Jepang. Thanks guys.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan juga masih banyak kekurangan, karena pengetahuan yang dimiliki oleh penulis terbatas. Akhir kata penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan semoga Allah SWT memberikan balasan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan untuk para pembaca umumnya.

Jakarta, Agustus 2012

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN LAYAK UJI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Politik Luar Negeri	9
B. Politik Luar Negeri dalam Studi Hubungan Internasional	12
C. Tujuan Politik Luar Negeri	14
D. Konsepsi Kebijakan Luar Negeri	15
E. Sumber-Sumber Politik Luar Negeri	17
F. Politik Luar Negeri Jepang secara Umum	20

BAB III POLITIK LUAR NEGERI JEPANG PASCA PENDUDUKAN
SEKUTU

A. Perang Dunia II	26
1. Awal Jepang terlibat Perang Dunia II.....	27
2. Jepang dalam Perang Dunia II	28
3. Jepang Menyerah Kalah dalam Perang Dunia II	29
B. Pendudukan Sekutu.....	30
1. Kebijakan Sekutu terhadap Pemerintahan Jepang	31
2. Perubahan Sikap Kebijakan Amerika Serikat terhadap Jepang ..33	
C. Pengembalian Kedaulatan Jepang	36
D. Politik Luar Negeri Jepang	38
1. Partai Demokrat Liberal (PDL)	40
2. Partai Oposisi	42
3. Parlemen	42
4. Kabinet	43
5. Kementrian Luar Negeri	44
6. Perdana Menteri	45
7. Kelompok Dunia Usaha	46
E. Kebijakan Politik Luar Negeri Jepang Pasca Pendudukan Sekutu	47
1. Politik Luar Negeri Jepang sebelum Perang Dunia II	47
2. Politik Luar Negeri Jepang pasca Pendudukan Sekutu	49
BAB IV KESIMPULAN	61
DAFTAR PUSTAKA	63
GLOSARI	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui, Jepang pernah menjadi negara yang agresif menaklukkan negara-negara Asia dan lainnya termasuk Indonesia. Sikap agresif Jepang yang membawa Jepang ke dalam Perang Dunia II tersebut dilatar belakangi beberapa faktor yang terjadi pada zamannya, tepatnya zaman Showa (1926 – 1945) dimana sejak awal zaman itu Jepang diganggu oleh berbagai kesulitan, kelesuan ekonomi dan terhambatnya hubungan diplomatik yang merupakan sebuah lingkaran setan (Irsan,2005:xi). Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi keuangan yang terpuruk disebabkan oleh kredit yang diberikan oleh sejumlah bank yang ternyata tidak bermodal menjerumuskan perekonomian Jepang ke dalam kekacauan yang semakin dipersulit oleh depresi besar yang dimulai dengan jatuhnya pasar saham di New York. Terlebih lagi dalam bidang ekspor dan urusan luar negeri pun Jepang mengalami kesulitan, dimana kegiatan ekspor menurun banyak, usaha kecil dan menengah bangkrut dan banyak orang kehilangan mata pencaharian, adapun dalam bidang urusan luar negeri, kebijakan Amerika Serikat untuk membatasi Jepang diperkeras dengan undang-undang yang menolak imigrasi Jepang diresmikan di Amerika Serikat serta di China, yang artinya gerakan untuk mengusir orang Jepang semakin kuat.

Menghadapi kesulitan-kesulitan yang dipaparkan di atas, baik di dalam maupun di luar negeri tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah saat itu, yakni pemerintah partai. Rakyat Jepang mulai tidak percaya pada kemampuan partai-partai politik. Mereka dianggap tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi, oleh karena itu sejumlah perwira muda mulai memikirkan secara sungguh-sungguh untuk mengatasi hal tersebut dan hal ini merupakan cikal bakal terjadinya Perang Dunia II, dimana saat itu militer Jepang mulai mengadakan kegiatan yang

mengarah pada suatu ekspansi ke luar negeri yang dimulai dengan petualangannya ke China kemudian meluas ke Indonesia. Namun pada akhirnya Jepang ditaklukan oleh sekutu pada 1945. Menyerahnya Jepang kepada sekutu maka berakhir pula Perang Dunia II.

Perang Dunia II awalnya berlangsung pada 1939 di Eropa. Jepang yang pada waktu itu telah menandatangani pakta militer dengan Jerman dan Italia, dengan sendirinya menempatkan diri berhadapan dengan pasukan sekutu (Amerika Serikat dan Inggris) Jepang juga dengan sengaja menantang Amerika dengan menyerang Pearl Harbour pada 7 Desember 1941 pagi, Pearl Harbour diserang mendadak oleh lebih dari 350 pesawat terbang Angkatan Laut Jepang yang terdiri atas pesawat pengebom, pelempar torpedo dan pemburu menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour (Hawaii) di Lautan Pasifik. Serangan mendadak tersebut menandakan dimulainya Perang Pasifik antara Jepang dengan sekutu (Irsan, 2005: xi).

Ada yang berpendapat bahwa Perang Pasifik tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak pasukan Jepang berhasil mendaratkan 5.000 tentaranya di Kota Baharu, Malaya, lebih kurang sembilan jam sebelum Jepang menggempur Pearl Harbour. Dalam waktu singkat Jepang berhasil mendaratkan pasukannya dan menguasai Thailand Selatan (8 Desember 1941), Guam (10 Desember 1941), Hong Kong (25 Desember 1941), Kalimantan Timur (11 Januari 1942), Palembang (14 Februari 1942), Singapura (15 Februari 1942), Kalimantan Utara dan Malaya (Suryohadiprojo, 1987: 128).

Apa yang dilakukan Jepang tidak mungkin tanpa persiapan yang lama dan matang. Sementara itu berbagai kalangan di Jepang beranggapan bahwa penyerangannya ke Pearl Harbour pada 7 Desember 1941 tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan pendadakan, karena semua informasi dan berbagai pernyataan tentang kesiapan Jepang untuk perang melawan Amerika Serikat dan Inggris sudah dapat diketahui melalui pemberitaan yang bersifat terbuka.

Perang Pasifik lebih dipicu karena embargo minyak Amerika Serikat dan Inggris terhadap Jepang yang menyebabkan negara itu mengambil keputusan

berperang melawan sekutu untuk kebutuhan survivalnya. Hal ini juga diperkuat karena dorongan perasaan nasionalismenya akibat tekanan politik yang terus menerus dari pihak Barat (Suryohadiprojo, 1987: 130). Selain itu, ada beberapa kelompok kaum nasionalis dan militer Jepang yang ingin menguasai Asia serta ingin melampiaskan kemarahannya melawan arogansi Barat yang hanya ingin menang sendiri dengan niat mendominasi dunia untuk kepentingan politiknya yang imperialistis. Atas faktor itulah niat Jepang untuk melawan bangsa Barat tak terbendung lagi. Selanjutnya Jepang terus meluaskan kekuasaannya ke negara-negara Asia dan berujung pada keterlibatannya dalam Perang Dunia II. Dalam Perang Dunia II itu Jepang seperti enggan untuk mengakhiri perangnya karena ambisi Jepang untuk menjadi Pemimpin Asia sangat besar. Ini dikenal dengan panji-panji Persemakmuran Asia Timur Raya (Christy, Olivia dan Scholastica, <http://www.scribd.com/doc/82430564/Ilmu-Pengetahuan-Sosial-2>, akses 10 Juli 2012).

Sikap agresif Jepang seperti yang diuraikan di atas baru bisa ditaklukkan oleh sekutu melalui Bom Atom yang memporak porandakan Hiroshima, Nagasaki dan kota lainnya. Dengan dijatuhkannya bom-bom tersebut maka Perang Dunia II telah berakhir, dimana Jepang bertekuk lutut, menyerah kalah kepada sekutu. Kekalahan Jepang tersebut diikuti dengan pendudukan sekutu di Jepang yang dipimpin oleh Jendral Douglas Mac Arthur dari Amerika Serikat yang berlangsung dari 1945 sampai 1952.

Berakhirnya Perang Dunia II pada Agustus 1945 ditandai dengan kehancuran Jepang yang cukup parah. Bangsa Jepang telah mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikologis. Lebih dari tiga juta penduduk Jepang meninggal dunia akibat berkobarnya perang. Sepertiga dari jumlah itu adalah penduduk sipil. Sekitar 40% kota-kota utama di Jepang hancur atau mengalami kerusakan berat sehingga banyak penduduk yang tidak memiliki tempat tinggal lagi. Industri Jepang di dalam negeri mengalami kehancuran dan berhenti berproduksi. Kelaparan terdapat di hampir seluruh wilayah Jepang serta produksi hasil pertanian mengalami penurunan yang drastis. Akibat perang ini

Jepang bukan saja mengalami kerugian ekonomi, tetapi tenaga dikuras dan harus menerima pendudukan sekutu di Jepang.

Dengan didudukinya Jepang oleh sekutu ini dapat dikatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, Jepang dijajah oleh bangsa lain, padahal hal tersebut telah diantisipasi oleh Jepang jauh hari sebelumnya. Puncaknya pada zaman Meiji, Jepang bertekad membenahi negaranya dengan pemikiran bila negaranya kuat dan kaya mereka tidak akan mudah dijajah oleh bangsa lain, dan untuk tujuan tersebut Jepang membuat semboyan *Fukoku Kyohai* yang artinya negara kaya militer kuat yang maknanya dengan menjadi negara yang kaya dan kuat militernya, maka Jepang tidak akan mudah dijajah oleh bangsa lain. Oleh karena itu, pendudukan atas negerinya tentunya sangat tidak diharapkan oleh Jepang, terlebih lagi dengan adanya syarat-syarat penyerahan yakni pasukan Jepang dilucuti, tawanan sekutu dibebaskan dan hak kaisar dan pemerintah Jepang untuk memerintah negara diletakkan di bawah pengawasan Panglima Tertinggi Pasukan Sekutu.

Sementara pihak sekutu, setelah berhasil menduduki Jepang, berusaha memaksakan visinya untuk menciptakan suatu masyarakat baru di Jepang yang sesuai dengan keinginannya. Yang dimaksud sekutu atau dapat dikatakan sebagai penakluk Jepang ini, sebenarnya terdiri atas persekutuan antara Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia, Uni Soviet, Belanda dan lain-lainnya, tetapi pada kenyataannya ketika memerintah wilayah Jepang lebih banyak dikuasai dan didominasi oleh peran para anggota militer Amerika Serikat. Amerika Serikat secara sengaja berusaha memasung agar Jepang tidak lagi memiliki kemampuan politik dan ambisi militernya, karena hal tersebut menjadi ancaman bagi bangsa dan negara lain khususnya bangsa Barat. Pemasangan itu ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Jepang yang baru yang memang sengaja dipersiapkan oleh Amerika Serikat.

Dalam pendudukan ini pihak pasukan pendudukan sekutu membentuk SCAP (*Supreme Commander for the Allied Powers*) yang merupakan penguasa, pengatur dan pelaksana kebijakan pemerintahan diseluruh wilayah Jepang (Suryohadiprojo, 1987: 55). Ada dua pendapat tentang *Supreme Commander for*

Allied Powers (SCAP) ini, yakni oleh kelompok konservatif Jepang. SCAP (*Supreme Commander for Allied Powers*) dikhawatirkan akan melakukan tindakan-tindakan balas dendam dan represif terhadap bekas kelompok militer Jepang, tetapi oleh kalangan Barat, SCAP (*Supreme Commander for Allied Powers*) justru dinilai tidak berkuasa sebagai "penguasa militer", bahkan memberikan kesempatan luas kepada bangsa Jepang untuk melakukan reformasi dalam kehidupan politik dan ekonomi serta melakukan demokratisasi.

Sebaliknya berbagai kalangan di Jepang cenderung berpendapat bahwa sebenarnya pada permulaannya Amerika Serikat sama sekali tidak mau memberi kesempatan kepada bangsa Jepang untuk ikut berperan dalam melakukan reformasi dan demokratisasi. Namun dengan semakin kritisnya situasi global dan regional akibat terjadinya Perang Dingin, yakni antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Komunis dibawah pimpinan Uni Soviet, maka kebijakan melakukan reformasi Jepang tersebut terpaksa mengalami perubahan yang cukup mendasar. Ini disebabkan selain kepekaan bangsa Jepang terhadap kelangsungan hidupnya sebagai bangsa, hingga selalu berusaha mempengaruhi kekuasaan pendudukan, juga karena Amerika Serikat saat itu berkepentingan untuk menjadikan Jepang sebagai sekutunya menghadapi Uni Soviet dan RRC, padahal tujuan semula menjalankan kebijakan demokratisasi di Jepang adalah untuk memperlemah dan benar-benar menghilangkan sama sekali kemampuan Jepang terutama di bidang militer dan politik. Sikap Amerika ini tentu saja dimanfaatkan Jepang untuk bangkit kembali dengan melakukan berbagai reformasi politik dan ekonomi, terlebih lagi ketika akhirnya Jepang dapat melepaskan diri dari kekuasaan pendudukan.

Pelepasan Jepang dari kekuasaan pendudukan dilaksanakan pada 8 September 1951 melalui Perjanjian Perdamaian antara Amerika Serikat dengan Jepang yang ditandatangani di San Fransisco dalam sebuah konferensi yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan kekuasaan dan kedaulatan kepada pihak Jepang pada 28 April 1952. Dalam konferensi itu, 56 negara yang pernah berperang dengan Jepang menandatangani Perjanjian Perdamaian tersebut, kecuali Uni Soviet dan RRC. Sejak saat itu Jepang mendapatkan kembali

kedaulatannya sebagai negara merdeka dan memperoleh identitas politiknya sebagai negara berdaulat.

Ada dua peristiwa penting yang mempengaruhi jalannya proses pengembalian kedaulatan kepada Jepang, yakni pecahnya Perang Korea pada 1950 dan dipecatnya Mac Arthur pada 1951. Pecahnya Korea menyebabkan perkembangan politik dalam negeri Jepang. Dengan semakin menonjolnya Uni Soviet sebagai kekuatan militer yang dapat menyamai Amerika Serikat. Sejak dipecatnya Mac Arthur sebagai Komandan SCAP (*Supreme Commander for Allied Powers*), pimpinan SCAP (*Supreme Commander for Allied Powers*) yang baru tidak dapat menyamai prestasi Mac Arthur. Jenderal Mac Arthur dinilai oleh pihak Jepang sebagai seorang tokoh yang telah memberi kesempatan banyak kepada para pemimpin Jepang untuk terlibat dalam penyelesaian berbagai masalah politik internal Jepang. Mac Arthur juga dianggap telah memberi peranan utama mempersiapkan kembalinya kedaulatan Jepang, padahal apa yang telah dilakukan Jenderal Mac Arthur mempunyai sasaran pokok yaitu untuk mempersiapkan Jepang sebagai bangsa yang akan selalu memberikan komitmennya mendukung kepentingan politik global dan regional Amerika Serikat di Pasifik, maka dapat diduga ketika Jepang dilepaskan dari kekuasaan pendudukan pada 1952 pun, politik luar negeri Jepang akan disesuaikan dengan sikap Amerika Serikat dalam arena internasional. Jepang tidak mempunyai politik luar negeri sendiri, sebab politik luar negerinya adalah bagaimana mengikuti Amerika Serikat dengan baik (Suryohadiprojo, 1987: 55).

Oleh karena itu dapat dikatakan meski Jepang telah memperoleh kembali kedaulatannya pada 1952, kebijakan luar negeri yang ingin diterapkan memiliki kebebasan dari pengaruh politik Amerika Serikat tidak dapat terealisasi dikarenakan kondisi global dan regional pada saat itu tidak memungkinkan Jepang melepaskan diri dari kepentingan strategi global Amerika Serikat maupun kepentingan regional Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik (Mangandaralam, 1987: 51).

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membuat penelitian bagaimana Jepang melaksanakan kebijakan politik luar

negerinya setelah memperoleh kembali kedaulatannya pada 1952, mengingat kondisi internal yang dihadapi Jepang bahwa berlakunya konstitusi yang pada dasarnya dibuat untuk kepentingan Amerika Serikat sebagai pemenang perang dengan tema Kebijakan Politik Luar Negeri Jepang Pasca Pendudukan Sekutu.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses Jepang menjadi negara yang mandiri pasca pendudukan sekutu ?
2. Bagaimana kebijakan politik luar negeri Jepang pasca pendudukan sekutu?

C. Ruang Lingkup

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis membatasi penelitian dari sebelum Perang Dunia II sampai pasca Perang Dunia II, tepatnya pada 2001.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan apa saja kebijakan politik luar negeri yang diterapkan oleh Jepang pasca pendudukan sekutu.

E. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kepustakaan dengan sifat penelitian deskriptif analisis, yaitu metode dengan mendeskripsikan data yang kemudian dianalisis.

F. Sistematika Penulisan

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,

permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, ruang lingkup dan

sistematika penulisan.

Bab II, merupakan landasan teori yang berkaitan dengan tema penelitian

Bab III, merupakan tema penelitian yakni Kebijakan Politik Luar Negeri

Jepang Pasca Pendudukan Sekutu

Bab IV, kesimpulan

